

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak
Tahun 2016-2017**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Adi Sugito

NPM : 147110087

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu‘alaikumwarahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan keidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembaran tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam poses penulisan dan menyelesaikan Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung

dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr H Syafrinaldi SH,MCL Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Islam Riau Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos, M.Si.
3. Bapak Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Hendry Andry, S.Sos, M.Si.
4. Ibu Dra. Hj. Monalisa, M,Si selaku Penasehat Akademik Penulis. Terima kasih atas bimbingannya selama kurang lebih 11 (sebelas) semester penulis menjalani studi di Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Indra Safri, S.Sos, M.Si. dan Nurmasari, S.Sos, M.Si juga selaku pembimbing dalam pembuatan Skripsi, mulai dari yang hanya sebatas judul dan menjadi sebuah Skripsi. Semua berkat bimbingan dari beliau. Terima kasih atas waktu dan masukannya kepada penulis.
6. Seluruh Dosen dan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mempekaya penegetahuan penulis dengan berbagai ilmu selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unisvesitas Islam Riau.
7. Teristimewah dengan ucapan teima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang tekasih Ayah handa H. Satino

(Alm) dan ibunda HJ. Suwarti, yang senantiasa memberikan dukungan dan doanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

8. Terima Kasih atas dukungan dan do'anya selama ini kekasih Restyawati Tanjung
9. Terima Kasih kepada teman satu kos bang Edo, Egi, Dedi, Yayan, Putra, Tomang, dan juga junior-junior Ica, Tesa, Yoren, Wiri, Sari, Rina. Terima Kasih atas dukungan dan Do'anya.

Penulis bemoon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Amin

Akhirnya penulis beharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembaca.

Pekanbaru, 6 November,2019

Penulis,

ADI SUGITO

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
LAMPIRAN.....	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACK.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumus Masalah.....	15
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan penelitian.....	15
2. Manfaat penelitian.....	15
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	17
A. Studi Kepustakaan.....	17
a. Konsep Ilmu Administrasi	17
b. Konsep Organisasi	20

c. Konsep Manajemen.....	23
d. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	26
e. Konsep Pemberdayaan	29
f. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah	37
B. Kerangka Pikir	41
C. Konsep Operasional	42
D. Operasional Variabel.....	44
E. Teknik Pengukuran	46
BAB III : METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	53
E. Jenis Dan Sumber Data	54
a. Data Pimer.....	54
b. Data Skunder.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	55
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	58
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	59
A. Gmbaran Umum Kabupaten Siak	59
B. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak	62
C. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak	63
D. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM.....	64
E. Kepegawaian	70
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Idenitas Responden	73

B. Hasil Penelitian terhadap Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017 76

BAB VI PENUTUP 98

A. Kesimpulan 98

B. Saran..... 101

DAFTAR PUSTAKA 103



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak	7
I.2 : Data UMKM Kabupaten Siak Per-Kecamatan Tahun 2016-2017	11
I.3 : Data Pendapatan Usaha Rumah per-Tahun Kabupaten Siak diKecamatan Siak-Mampura 2017	13
II.1 : Operasional Variabel Peneitian Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Mikro Kecil dan Menengah Kab. Siak	44
III.1: Jumlah Populasi dan Sampel Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....	52
III.2 : Jumlah Populaasi dan Sampel Masyarakat Pengelolah Usaha Mikro Kecil Kecamatan Siak-Mampura.....	53
III.3: Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Analisi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab.Siak. 2018-2019	58
IV.1: Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Menurut Satuan Kerja Tahun 2019.....	70
IV.2: Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019.....	71

IV.3: Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Menurut Pangkat/Golongan.....	72
V.1: Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Penelitian Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017	74
V.2 : Jumlah Responden Berdasarkan Usia/Umur Pada Penelitian Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017	75
V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Pada Penelitian Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017	76
V.4 : Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Pemungkinan atau Fasilitasi.....	78
V.4a : Analisis Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Pemungkinan atau Fasilitasi	79
V.5 : Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil)Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Penguatan (<i>empowering</i>).....	84

V.5a:	Analisis Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Penguatan (<i>empowering</i>)	85
V.6 :	Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Perlindungan (<i>protecting</i>).	90
V.6a:	Analisis Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Perlindungan (<i>protecting</i>).	91
V.7 :	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Mikro Kecil dan Menengah Kab. Siak.....	41
IV.1: Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Memengah Kabupaten Siak, Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016.	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. :Daftar Wawancara Kepala Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....	106
2. Daftar Wawancara Kepala Bidang Dinas Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....	111
3. Daftar Wawancara Kepala Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....	114
4. Daftar Wawancara Kepala Seksi Pemasaran Sumber Daya dan Jaringan Usaha Kabupaten Siak	118
5. :Daftar Kuisisioner Masyarakat Pengelola Usaha Mikro Kecil	122
6. :Rekapitulasi Telly Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017.....	129
7. : Dokumentasi.....	131
8. :SK Dekan Fisipol UIR No.126/UIR-Fs/Kpts/2018 . Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Adi Sugito	147
9. :Surat Rekomendasi No.650/E-UIR/27-FS/2019 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	148
10. : Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN RISET/24811 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	149

11. :Surat Rekomendasi No.070/KESBANPOL/279 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....150
12. SK Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak No.090/SK/KOP-UMKM/VIII/2019/344 Tentang Sudah Melakukan Penelitian di Dinas Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.....151



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Adi Sugito
NPM : 147110087
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya melangga dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 November 2019
Pelaku Pernyataan,

Adi Sugito

**ANALISIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL OLEH DINAS
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
SIAK TAHUN 2016-2017**

ABSTRAK

Adi Sugito

Kata Kunci : Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam melaksanakan pembinaan pemberdayaan usaha mikro kecil di Kabupaten Siak penting dilakukan karena pemberdayaan usaha mikro kecil di Kabupaten Siak merupakan salah satu permasalahan hingga kini belum tertangani dengan baik. Untuk menganalisis permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori Edy Suharto sesuai dengan permasalahan tersebut menggunakan indikator pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan. Tipe penelitian yang berlokasi di dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Siak ini adalah *surve deskriptif*, yaitu mempeoritaskan daftar kusioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas berada dan tujuan penelitian pada lokasi penelitian. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai, dan pelaku usaha mikro kecil. Pelaku usaha mikro kecil dalam hal ini adalah mereka sebagai pelaku produksi usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Siak. Besaran sampel yang ditetapkan dari kedua kelompok populasi ini adalah 4 orang untuk pegawai dan 20 untuk pelaku usaha mikro kecil. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik *sensus* untuk pegawai dan pelaku usaha mikro kecil. Jenis dan data pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kusioner dan wawancara serta data skunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel *ferkuensi*. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa analisis pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017 berada apa interval penilaian cukup baik.

**ANALYSIS OF EMPOWERMENT OF SMALL MICRO BUSINESSES BY
THE MINISTRY OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS COOPERATIVES
OF SIAK REGENCY IN 2016-2017**

ABSTRACT

Adi Sugito

Keywords: Empowerment of Small Micro Enterprises

This study aims to determine the analysis of empowerment of micro small businesses by the Office of Cooperatives for Small and Medium Enterprises in Siak Regency 2016-2017. The Office of Cooperatives for Small and Medium Enterprises in Siak Regency in carrying out the development of empowerment of micro small businesses in Siak Regency is important because the empowerment of micro small businesses in Siak Regency is one of the problems so far it has not been handled properly. To analyze the problem the researcher uses Edy Suharto's theory in accordance with the problem using indicators of possibilities or facilitation, reinforcement, protection. This type of research, which is located in the Cooperative Service for Small and Medium Enterprises in Siak Regency, is a descriptive survey, which prioritizes a questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions of objectivity and research objectives in research sites. There are two population groups and the sample in this study are employees, and micro small businesses. The micro-small business actors in this case are those as small-scale micro business production actors in Siak Regency. The sample size determined from these two population groups is 4 people for employees and 20 for micro and small businesses. Two sampling techniques used in determining individual samples are census techniques for employees and micro-small business operators. Types and data collection data used consisted of, primary data collected using questionnaire and interview techniques as well as secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use the fermentation table tool. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the analysis of empowerment of micro-small businesses by the Office of Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises in Siak Regency in 2016-2017 is located at quite good assessment intervals.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih di dalam suatu organisasi yang berdasarkan keterampilan dan kemampuan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati bersama. Sebuah organisasi selalu ditompangi oleh administrasi yang berperan baik, karena dengan administrasi kegiatan yang berlangsung di dalam organisasi tersebut bisa berjalan dengan terstruktur dan sistematis. Sedangkan organisasi adalah suatu wadah dimana tempat orang-orang atau suatu kelompok menjalankan kerja sama yang didalamnya terdapat serangkaian kegiatan dan aktifitas yang didasari oleh kesepakatan bersama dalam usaha pencapaian tujuan atas pembagian-pembagian tugas yang telah ditentukan. Menurut Zulkifli (2005;74) mengemukakan bahwa organisasi sebagai wadah pelaksanaan kerja sama dan juga mencakup serangkaian aktivitas pembagian tugas, penunjukan staf, pendegelasan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka upaya pencapaian tujuan organisasi.

Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan maka sudah tentu harus memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan dan menjalankan organisasi, adapun ilmu itu tersebut terdapat dalam manajemen, manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga

mengoptimalkan bantuan kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian sebuah tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Menurut darwis dkk (2009;5) mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karna itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia. Dalam meninjau bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan di dalam administrasi, dipilih pendekatan yang dinamis. Bertitik tolak dari teori pokok manajemen yang meski sudah banyak mengalami perubahan tetapi sekurang-kurangnya harus terdiri atas tiga kelompok kegiatan besar, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Menurut Sumodiningrat (dalam Aprillia Theresisa, 2015; 93) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. menurut subejo dan Supriyanto (2005: 96) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui tindakan kolektif dan jaringan sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Tidak saja menumbuhkan kembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya.

Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat. Terkait dengan hal ini, pembangunan, apapun pengertian yang diberikan terhadapnya, selalu merujuk pada suatu perbaikan, terutama perbaikan pada mutu hidup manusia, baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial budayanya. Mengacu kepada konsep-konsep maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan :

- a. Perbaikan kelembagaan
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
- b. Perbaikan usaha
Perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
- c. Perbaikan pendapatan
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- d. Perbaikan lingkungan
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karna kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
- e. Perbaikan kehidupan
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
- f. Perbaikan masyarakat
Keadaan kehidupan yang baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menompang pertumbuhan ekonomi sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah

adalah memberdayakan dan menumbuhkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Sejarah telah menunjukkan bahwa UMKM di Indonesia tetap eksis dan berkembang meski terjadi krisis ekonomi yang telah melanda negeri ini sejak tahun 1997. UMKM mampu memberikan andil besar terhadap penerimaan negara dengan pemasukan produk domestik bruto (PDB) melalui pembayaran pajak. (*Sumber: CNN Indonesia, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*).

Upaya mengentaskan kemiskinan dan menghasilkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di masyarakat dibutuhkan peranan dari lembaga eksekutif maupun legislatif untuk menumbuh kembangkan potensi didalam negeri baik dari sumber daya manusia (SDM) maupun industri dan potensi di setiap daerah.

Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Menindak lanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam meningkatkan laju perekonomian di Indonesia serta mengentaskan kemiskinan di Provinsi Riau. Maka Provinsi Riau terkhusus pada Kabupaten Siak dalam menanggapi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tersebut, maka Kabupaten Siak mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016, untuk berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak sebagai salah satu unsur perangkat daerah memiliki fungsi pembinaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Siak fungsi ini sesuai dengan konsep usaha kecil sebagai kelompok usaha yang potensial dalam mengurangi angka kemiskinan, karena dengan usaha ini maka penduduk mengusahakan sumber-sumber ekonomi yang produktif bagi keluarga atau masyarakat yang ada disekitarnya. Sehingga hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan secara berkesinambungan. Peran Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak dalam kaitanya dengan pelaksanaan fungsi tersebut telah menerapkan kebijakan sebagai upaya nyata di bidang pembinaan usaha kecil.

Seperti yang kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria Usaha Mikro, Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan

tahunan paling banyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh Milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 50.000.000.000.- (lima puluh milyar rupiah).

Proses kegiatan suatu organisasi pasti akan mengalami hambatan dan rintangan dalam mencapai tujuannya. Salah satunya adalah upaya dalam peningkatan sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi. Banyak yang telah mengalami kemunduran bahkan kegagalan dalam mencapai tujuannya hanya karena permasalahan peningkatan sumber daya manusia. Salah satu sasaran pengelolaan sumber daya manusia pada fungsi manajemen organisasi adalah menyangkut masalah kepemimpinan, seorang yang ditunjuk sebagai pemimpin maupun yang diakui oleh anggota sebagai orang yang pantas memimpin mereka, dialah yang menjalankan fungsi organisasi tersebut.

Untuk melaksanakan tugas pokok sehari-hari, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Siak, dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

Tabel I.1 : Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Wan Fazri Auli., M.Si	Kepala Dinas
2	Drs. Hj. Nining Riskiati, M.Si	Sekretariat
BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		
6	Herzulidiawati, SE. MM	Kabid
Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		
7	Julio Karya, SE	Kepala Seksi
8	Marzuki	Staf
9	Normah, S.Kom., M.Si	Staf
Seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan		
10	Drs. Hj. Herlina Khitra Dewi, M.Pd	Kepala Seksi
11	Marzuki	Staf
12	Normah, S.Kom., M.Si	Staf

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak

Terlihat pada tabel Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Terfokus di Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada setiap bidang Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) KASI dan 2 (dua) Staf, sedangkan di bidang Seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan hanya

mempunyai 3 (tiga) anggota yang terdiri dari 1 (satu) KASI dan 2 (dua) staf. Dari keseluruhan jumlah pegawai yang ada dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah hanya ada 2 (dua) Staf yang sama yang membantu 2 (dua) Bidang Seksi sekaligus yaitu Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan. sehingga menghambat tugas dari setiap seksi dalam melaksanakan tugasnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, Serta tata kerja , Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Pasal 2 dijelaskan bahwa tugas Pokok dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

“Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.

Sedangkan menyakut fungsi, pasal 4 menyatakan untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Koperasi UMKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang Koperasi dan UMKM.
- c. Pembinaan Pelaksanaan tugas dibidang Koperasi dan UMKM.
- d. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas.
- e. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Adapun Program dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan pencapaian kinerja serta keuangan
- d. Program pengembangan kewirausahaan dan keuangan kompetitif Usaha kecil menengah
 - Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD
 - Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
 - Investasi perkembangan UMKM Kabupaten Siak
 - Promosi Komoditas Unggulan daerah
 - Fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah
 - Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha UMKM
 - Pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan produk UMKM
 - Pengembangan jaringan pemasaran bagi produk unggulan UMKM
 - Pelatihan manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif (Usaha Mikro)
 - Bimbingan peningkatan mutu produk UMKM
 - Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha Mikro kecil dan menengah
 - Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi
 - Pelatihan kerajinan rumah tangga batik Siak
 - Peningkatan kualitas produk UMKM
- e. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- f. Program pemberdayaan dan UMKM
 - Kegiatan : revitalisasi pasar tradisional
 - Kegiatan : pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMSKOP).
 - Kegiatan : pengembangan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) bagi UMKM
 - Kegiatan : penataan pedagang kaki lima (PKL), UKM mart
 - Kegiatan : pembangunan pasar wisata yang dikelola koperasi
 - Kegiatan : pembangunan kawasan sentra UMKM
 - Kegiatan : fasilitasi batuan peralatan perikanan
 - Kegiatan : fasilitasi batuan peralatan peternakan
 - Kegiatan : fasilitasi batuan peralatan perkebunan
 - Kegiatan : batuan permodalan koperasi perkotaan / pedesaan

Didalam program kerja Dinas Koperasi UMKM Kab. Siak khusus pada bagian pemberdayaan salah satunya Program pengembangan kewirausahaan dan

keuangan kompetitif Usaha kecil menengah, secara keseluruhannya masih belum terlaksana secara optimal, seperti :

- a. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
- b. Pelatihan peningkatan kapasitas keterampilan produk UMKM
- c. Pelatihan manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif (Usaha Mikro)
- d. Peningkatan kualitas produk UMKM
- e. Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi

Salah satu yang menjadi potensi di setiap daerah adalah keberadaan UMKM, karena usaha ini mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun tidak tentu berjalan dengan mulus, masalah yang dihadapi bukan berarti tidak bisa diatasi oleh para pelaku usaha ini tetapi hanya perlu bekerja sama dengan pemerintah yang salah satu tujuannya untuk membenahi usaha mikro kecil dan menengah menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintah juga menyadari pentingnya UMKM, bukan hanya sebagai salah satu sumber penting kesempatan kerja dan pendapatan, yang selanjutnya berarti salah satu sumber-sumber penting pengurangan kemiskinan di Kabupaten Siak. berdasarkan survey awal peneliti dan berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari tahun 2016 dan 2017 peneliti menemukan peningkatan jumlah usaha mikro kecil (UMK) di setiap Kecamatan di Kabupaten Siak. Berikut data UMKM Kabupaten Siak :

Tabel I.2 : Data UMKM Kabupaten Siak Per-Kecamatan 2016-2017

NO	Nama Kecamatan	Usaha Mikro		Peningkatan	Usaha Kecil		Peningkatan	Usaha Menengah		Peningkatan
		2016	2017	2017	2016	2017	2017	2016	2017	2017

1	SIAK	206	242	36	172	180	8	6	7	1
2	BUNGARAYA	186	198	12	30	45	15	1	0	0
3	SUNGAI APIT	218	229	11	95	0	0	3	0	0
4	PUSAKO	41	60	19	8	9	1	0	0	0
5	SABAK AUH	24	40	16	28	29	1	0	2	2
6	DAYUN	188	209	21	204	210	6	0	0	0
7	KOTO GASIB	168	205	37	71	83	12	0	0	0
8	LUBUK DALAM	103	129	26	41	44	3	0	0	0
9	KERINCI KANAN	143	148	5	16	18	2	0	0	0
10	TUALANG	161	199	38	63	78	15	0	0	0
11	MINAS	84	102	24	18	22	4	0	0	0
12	KANDIS	169	180	11	85	87	2	0	0	0
13	MEMPURA	54	95	41	41	47	6	0	0	0
14	SUNGAI MANDAU	59	91	32	20	25	5	0	0	0
	TOTAL	1804	2127	329	792	877	80	10	9	3

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kab. Siak, Data Rekapitulasi Perkembangan UMKM.

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa data UMKM di wilayah Kabupaten Siak meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Jumlah peningkatan usaha mikro tertinggi berada di Kecamatan Mempura sebesar 41 Unit dan yang terendah pada kawasan Kecamatan Kerinci Kanan sebesar 5 Unit.

Selain itu disebutkan juga data tentang usaha kecil yang mempunyai jumlah peningkatan tertinggi ditempati oleh 2 Kecamatan Bungaraya dan Tualang

dengan 15 unit usaha kecil dan yang terendah yaitu kawasan Kecamatan Sungai Apit. Sedangkan dalam usaha menengah peningkatan tertinggi diduduki oleh Kecamatan Sabak Auh sebesar 2 unit dan yang terendah teradapat di 12 Kecamatan, Bungaraya, Sungai Apit, Pusako, Dayun, Koto Gasip, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan, Tualang, Minas, Kandis, Mampura, Sungai Mandau sebesar 0 unit.

Dengan adanya data peningkatan jumlah pelaku usaha rumahan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal dan hampir setiap hari dan hampir setiap tempat dapat ditemui usaha rumahan dan usaha tersebut termasuk dalam katagori UMKM. Mengingat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui tingkat kesejahteraan jenis UMKM ini melalui pendapatan Per-Tahun. Berikut pendapatan Per-Tahun UMKM dari dua Kecamatan yang ada Di Kabupaten Siak :

Tabel I.3 : Data Pendapatan Usaha Rumahan Per-Tahun Di Kabupaten Siak diKecamatan Siak-Mampura 2017

No	Produk Usaha	Kecamatan	Pendapatan
1	Makanan Cake	Siak	Rp. 18.000.000
2	Dodol	Siak	Rp. 8.400.000
3	Kerajinan tangan	Siak	Rp. 3.600.000
4	Kerajinan Tenun	Siak	Rp. 6.000.000
5	Wedang jahe	Siak	Rp.3.600.000

6	Kue kering	Mampura	Rp. 8.400.000
7	Keripik	Mampura	Rp.1.600.000
8	Renging ubi	Mampura	Rp. 6.000.000
9	Kerupuk Udang	Mampura	Rp. 6.000.000
10	Salad buah	Mampura	Rp. 2.400.000

RATA-RATA PENDAPATAN		RP. 6.400.000
-----------------------------	--	----------------------

Sumber: Data perkembangan UMKM kab. Siak 2017.

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwadari 10 orang dan jenis usaha yang berbeda-beda dari dua Kecamatan yang ada di Kabupaten siak didapatkan pendapatan rata-rata per-tahun sebesar Rp. 6.400.000. Dengan rata-rata pendapatan per-tahun Rp. 6.400.000. jika kita rujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kriteria Usaha Mikro akan menghasilkan untung paling rendah Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.300.000.000 per-Tahun dan untuk kriteria Usaha Kecil paling rendah Rp.50.000.000 dan paling banyak Rp.500.000.000, per-Tahun, sedangkan dari data tabel diatas Cuma didapatkan pendapatan rata-rata pelaku usaha mikro, Kecil per-Tahunnya hanya Rp.6.400.000, maka masih sangat jauh dari yang diharapkan. Sementara Data Usaha Mikro kecil dan Menengah terus meningkat. Dari dua Kecamatan tersebut tentunya perlu ditingkatkan lagi melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kebijakan prinsip-prinsip wirausahaan dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten Siak. Agar tercapainya pendapatan yang

diinginkan sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 2008.

Berdasarkan data yang penulis paparkan diatas perkembangan UMKM di Kabupaten Siak bukan berarti tidak ada masalah justru dihadapkan oleh berbagai masalah. Masalah yang terjadi disebabkan :

1. Masih Kurang kopetensi dan kualitas dariSDM aparatur atau pembina dibidang UKM, dikarenakan mayoritas SDM yang dimiliki Dinas KoperasiUsaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak masih terbatas jumlah pegawai sehingga adanya Pelaksana yang merangkap 2 (dua) jabatan di 2 (dua) Seksi yaitu seksi UMKM dan seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan. dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, dapat dilihat ditabel I.1 pada halaman 7.
2. Dilihat dari data UMKM per-Kecamatan di Kabupaten Siak, tabel I.2 hal 11 terjadi peningkatan di setiap UMKM. Akan tetapi terlihat pada tabel 1.4 pada halaman 13,tingkat kesejahteraan jenis UKM di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ini melalui pendapatan Per-Tahun masih kurang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ”**Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi**

Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Siak”

B. Rumus Masalah

Dari penejelasan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan Usaha Mikro kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Siak ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Siak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat bagi kepentingan Akademis, pengembangan ilmu administrasi Khususnya analisis pemberdayaan Usaha Mikro kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Siak Dalam bentuk penelitian langsung di lapangan. Disamping itu, hasil penelitian dapat semakin memperluas wawasan teori peneliti.
2. Manfaat praktis Memberikan masukan kepada Pemerintahan Kabupaten Siak dalam memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana analisis pemberdayaan Usaha Mikro kecil yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Siak
3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan kajian bagi peneliti yang berminat tentang topik penelitian ini. Baik dengan teknik analisi yang sama tapi objek berbeda, atau objek yang sama dengan analisis berbeda, maupun kombinasinya. Juga dapat dijadikan bagi keperluasn analisis yang lebih mendalam dan detail.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KEANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

a. Konsep Ilmu Administrasi

Menurut Zulkifli (2005;16-17) Administrasi diidentikkan dengan berbagai bentuk keterangan tertulis, dalam study administrasi dikonsepsikan sebagai administrasi dalam arti sempit. Pada konteks ini administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Administrasi dalam arti luas menyangkup keseluruhan proses aktifitas kerja sama sejumlah didalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian maka dapatlah dipahami juga bahwa administrasi merupakan suatu proses dalam pelayanan pengaturan.

Menurut Nawawi (dalam Syafi'I, 2003:5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi 2011:7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administrare*, yaitu gabungan *ad* (to) + *ministrare* (serve). Kata ini selanjutnya membentuk kata *admistratio* yang berari cara membantu atau memberi bantuan.

Menurut Siagian (2006;14) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut White (dalam Syafi'I 2003;13) Administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil

Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi 2011;7) Administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi.

Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut :

1. Pengorganisasian
2. Manajemen
3. Tata hubungan
4. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha
7. Perwakilan.

Defenisi para ahli mengenai administrasi publik yang lebih dikenal sebagai administrasi negara merupakan sekumpulan orang yang bekerjasama didalam suatu organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Secara efektif dan efisien. Admisistrasi negara bergerak dalam organisasi pemerintahan maka untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan serta keteraturan dalam kehidupan masyarakat maka melalui pelaksanaan kerja dalam penertiban gelandangan dan pengemis oleh pegawai yang kompeten dan bekerja secara maksimal sehingga pada akhirnya dapat menciptakan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat dan dalam pemerintahan.

Rosenbloom and Goldavan (dalam Safri 2012;20) Administrasi Publik adalah penggunaan kepemimpinan secara politis dan berbagai proses dan teori yang sah untuk menjalankan tugas-tugas legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam penyediaan peraturan bagi pelayanan seluruh atau sebagian masyarakat.

Dwight Waldo (dalam Safri 2012;21) Administrasi Publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.

Administrasi Negara adalah semua kegiatan dan tindakan dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan Mustopadidjaja (2003;9)

Dengan berbagai defenisi administrasi publik diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah sebuah bentuk usaha dan aktifitas yang berhubungan dengan peraturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi, jadi boleh dibilang bahwa administrasi punya peran yang sangat krusial dalam semua aktifitas sebuah organisasi.

b. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, Organisasi merupakan suatu tempat administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi, tugas dan tujuan organisasi tersebut. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan dan aktivitas organisasi. Tanpa adanya administrasi didalam sebuah organisasi yang mampu bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi didalamnya, maka tujuan organisasi akan sulit untuk tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Sufian Hamim (2005:24) organisasi adalah proses pengabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, memberi saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Menurut James D. Mooney (dalam Manullang 2012;59) Organisasi adalah bentuk setiap peserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan Chester I. Barnard (dalam Manullang 2012;59) Organisasi sebagai suatu sistem dari aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Setiap organisasi itu harus menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam melaksanakan setiap fungsi, tugas, dan wewenang dan tanggung jawab seperti yang dirumuskan oleh Atsmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005:75) sebagai berikut :

- a. Organisasi itu harus mempunyai tujuan
- b. Harus ada pembagian kerja dan penugasan kerja yang homogeny
- c. Antara tugas, tanggung jawab dan kekuasaan harus selalu kesesuaian
- d. Setiap pelimpahan kekuasaan dan tugas harus dilakukan setepatnya
- e. Kesatuan komendo atau hirarki
- f. Komunikasi

- g. Kewajiban pimpinan untuk mengandakan pengecekan terhadap tugasnya
- h. Kontinuitasi
- i. Saling asuh antara intasndi lini dan staf
- j. Koordinasi
- k. kehayatan

Dari batasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu wadah atau suatu sistem saling mempengaruhi antara orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga sebagai tata hubungan sosial, dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya didalam organisasi tersebut. Organisasi diciptakan sebagai kolektivitas yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan khusus tertentu yang sedikit banyak didasarkan pada asas kelangsungan.

Menurut Waldo (dalam Syafi'I 2003;52) Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi.

Menurut Siagian (2006;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, Organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, Organisasi dapat dipandang sebagai proses dimana analisis *interaction* antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi

yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh Siagian (2006;97) sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang didalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.
4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ciri-ciri Organisasi tersebut diterapkan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan didalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan.

Organisasi Publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi.

Tujuan Organisasi Publik sendiri menurut Handoko (2017;109), yaitu suatu keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan sebagai pernyataan tentang keadaan di waktu yang akan datang dimana organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya, pendirian organisasi publik bertujuan secara optimal bagi peningkatan:

- 1) Kesejahteraan rakyat, karena pada hakekatnya pelayanan publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mencapai suatu kesejahteraan.

- 2) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi bagi negara dan masyarakat, bukan sebagai penguasa terhadap negara dan masyarakatnya.
- 3) Kualitas pelayanan umum atau publik diberbagai bidang pemerintahan umum dan pembangunan terutama pada unit-unit kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan. Selain itu, era reformasi menuntut pelayanan umum harus transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.

c. Konsep manajemen

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry (2009:2) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut Stoner (dalam Zulkifli, 2005:28) manajemen merupakan proses perencanaan, mengorganisasikan dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam definisi di atas manajemen berada dititik beratkan pada usaha memanfaatkan orang-orang lain dalam pencapaian tujuan.

Untuk mencapai tujuan tersebut orang-orang didalam organisasi haruslah memiliki wewenang, tanggung jawab dan tugas pekerjaan yang jelas. Dan dari pengertian di atas dipastikan adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien. Jika konseptualisasi manajemen di atas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan intu dari administrasi.

Menurut Hasibuan (2006:2) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Fayol (dalam Siagian 2006:84) mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Pemberian komando.
4. Pengkoordinasian.
5. Pengawasan.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur dari pada organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Manullang (2012;3) Manajemen Publik adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut darwis dkk (2009;5) mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karna itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumberdaya manusia yang ada, maka dengan demikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia

Dengan berbagai defenisi manajemen diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah sebagai proses untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain seperti perencanaan, pengorganisasian serta pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan.

d. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.

Menurut Manullang (2012;196) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah anak atau cabang dari pada manajemen. Alat untuk memperoleh hasil melalui orang lain, dan karena manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu cabangnya, maka ia pun mempunyai sasaran yang sama dengan manajemen.

Menurut Fathoni (2006;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Mangkunegara (2011;2) Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen Sumber Daya Manusia dapat

didefinisikan juga sebagai suatu pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai).

Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain. ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain untuk mencapai tujuan.

Untuk itu manajemen sumber daya manusia perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Adapun tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati (2007;14) adalah sebagai berikut:

Tujuan MSDM adalah untuk meningkatkan dukungan sumber daya manusia guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas manajemen sumber daya manusia, akan digambarkan secara umum sebagai berikut.

Menurut Sedarmayanti (2009;6) Manajemen sumber daya manusia adalah penarikan seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Menurut Sedarmayanti(2009;6) Manajemn sumber daya manusia adalah seni untuk

merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kegiatan sumber daya manusia atau pegawai, dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi.

Berbagai kegiatan tersebut antara lain :

1. Persiapan dan penarikan.
2. Seleksi.
3. Pengembangan.
4. Pemeliharaan.
5. Penggunaan.

Selain itu peran MSDM juga di kemukakan oleh Hasibuan (2000;14). MSDM mengatur dan menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah-masalah sebagai berikut :

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas the righth man in the righth place and the righth man in the righth job.
3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan pemberhentian.
4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumberdaya manusia pada masa yang akan datang.
5. Memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya.
6. Memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijakan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis.
7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembangan serikat buruh.
8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan.
9. Mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal.
10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya.

e. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah *empowerment*. Kata *power* dalam *empowerment* diartikan sebagai “daya” ditambah awalan *pe-* dan akhiran menjadi pemberdayaan. Daya dalam bahasa Indonesia berarti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Dalam ilmu sosial, terdapat berbagai definisi dan pemahaman mengenai pemberdayaan. Pemberdayaan dari berbagai literatur dipandang sebagai sebuah proses dan sekaligus sebuah tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau pemberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat.

Definisi dari Pemberdayaan itu adalah sebuah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Menurut Sumodiningrat (dalam Aprillia Theresisa, 2015; 93) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.

menurut Subejo dan Supriyanto (2005: 96) proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelolah sumberdaya lokal yang

dimiliki melalui tindakan kolektif dan jaringan sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Menurut Kieffer (dalam Edy Suharto, 2005: 63) pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif.

Pandangan mengenai pemberdayaan sebagaimana dikekmukakan oleh pranaka (1996;45-70) yaitu :

- a) Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasngkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.
- b) Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power tto every body*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang berpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengaliensi hak normative manusia yang tidak berkuasa atau tidak dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikkan kesemua orang, agar semua orang dapat mengatualisasikan diri.
- c) Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan yang lainnya. Pandangan ini adalah anti tesis pandangan : *to no body* dan pandangan *power to every body*. I, pandangan *power to no body* adalah kemustahilan dari *every body* adalah *chaos* dan anarki. Oleh sebab itu pandangan ketiga yang paling realistis adalah *power to the powerless*.

Kemudian pemberdayaan dapat dibedakan dalam dua hal : pertama, bahwa pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuasaan dan kemampuan pada individu atau sekelompok agar lebih berdaya, ada unsur luar (baik dalam bentuk

lembaga kemandirian ataupun individu) yang memberikan kekuasaan (*power to powerless*) untuk dapat mengambil peran yang berharga bagi lingkungannya. Kedua, memunculkan kekuatan yang kemampuan individu dan kelompok yang selama ini masih terpendam, melalui stimulasi dan motivasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada dirinya akan kemampuan yang dimiliki.

Pranaka (1996;57) menyebutkan kedua hal tersebut kecenderungan primer dan skunder. Kedua kecenderungan tersebut akan merubah individu atau kelompok dari kondisi serba keterbatasan hingga lebih dapat mengembangkan. Proses dirinya memberdayakan muncul dari kondisi sosial ekonomi budaya yang dikotomis yaitu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat yang dikuasai untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai. Pemberdayaan hendaknya menyangkut kondisi sosial, ekonomi dan budaya dari yang diberdayakan.

Selanjutnya pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas jaminan pemasaran, dll. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraannya Sumodiningrat (dalam Aprillia Theresia, 2005: 122).

Keberhasilan proses dalam pemberdayaan masyarakat bukan merupakan keberhasilan pengelola atau fasilitator program, melainkan harus diakui oleh

masyarakat sebagai keberhasilan usaha mereka sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lao Tzu (dalam Mardikanto,2003).

Upaya-upaya pemberdayaann masyarakat yang dilakukan umumnya mempunyaai arah yang sama atau paling tidak mirip satu dengan yang lain. Langkah itu pada dasarnya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan terus menerus. Upaya yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bisa dicapai secara optimal bila masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan dalam setiap tahap pembangunan. Berarti masyarakat merupakan subjek dari proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi program.

Dalam UU No.32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 2 Tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah pengikut sertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan masyarakat sebagai pemegang saham dan kepentingan implemtasi dari pelakasanaan desentralisasi kepada masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonom, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai matapencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia definisi pemberdayaan adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan/berkelanjutan. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat :

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan sumber daya yang tersedia.
- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok.
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Menurut Dhal (dalam Aprillia Theresia, 2005: 122) pemberdayaan yang berasal dari kata *empowerment*. Sangat berkaitan dengan kekuatan atau kekuasaan (*power*). Karna itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan “kekuatan” atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang lainnya lagi.

Menurut Iffe (dalam Edy Suharto, 2005 ; 59), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas:

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan: kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.

- 3) Ide atau gagasan : kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- 4) Lembaga-lembaga : kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- 5) Sumber-sumber : kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi : kemampuan memanfaatkan dan memngelolah mekanisme produksi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa.
- 7) Reproduksi : kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tampak bahwa hakekat pemberdayaan mesyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas da lokal itu, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Menurut sejumlah pengamat, sebagaimana dikutip oleh Edy Suharto (2005 ; 68-69), terdapat beberapa prinsip pemberdayaan :

- 1) Pemberdayaan adalah proses kerjasama. Karena pekerja sosialmdan masyarakat harus berkerjasama sebagai mitra.
- 2) Proses penguatan yang bertujuan mengentaskan sistem klien sehingga mampu dan cukup membuka akses sumber-sumber dan kesempatan.
- 3) Klien harus mempersiapkan dirinya sebagai agen perubahan.
- 4) Kecakapan yang diperoleh atau diuji melalui pengalaman dalam hidup khususnya pengalaman dalam melaksanakan sendiri dari pada dari lingkungan yang memerintahkan apa yang harus dilaksanakan.
- 5) Penyelesaian masalah yang dikembangkan dalam situasi tertentu hendaknya mencerminkan keragaman dan menekan atau menggambarkan kompleksitas berbagai faktor pendukung atau penyebab berbagai situasi masalah.

- 6) Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber pendukung yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.

Disamping itu, pemberdayaan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar menurut IFE, 1995:178, dan Kartasasmita, 1996:28. Yaitu :

a) *Prinsip Partisipasi*

Bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.

b) *Prinsip Sustainability*

Mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri sehingga menciptakan penumpukan modal (*capital cumulation*) dalam wadah sosial ekonomi setempat.

c) *Prinsip Demokratis*

Menhendaki agar rakyat dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.

d) *Prinsip Transparansi*

Mengisaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumber daya. Terutama keuangan harus dilakukan secara transparan (terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran dan mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.

e) *Prinsip akuntabilitas*

Mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksanaan program secara terbuka serta dapat dipertanggung jawabkan.

f) *Prinsip Desentralisasi*

Dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

g) *Prinsip Profitabel*

Memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelolah kegiatan secara ekonomis.

h) *Prinsip Acceptable*

Mengarahkan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar mudah diterima dan didaya gunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana serta pengelola.

i) *Prinsip Replicable*

Mengisaratkan agar pengelola pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Edy Suharto (2005:67) upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu :

1) Pemungkinan (*enabling*)

Menciptakan susana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.

2) Penguatan (*Empowering*)

Yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan secara mandiri.

3) Perlindungan (*Protectig*)

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil.

Membuat mekanisme kontrol untuk mengatur saling keterkaitan (*Interdependensi*) antara organisasi formal dan informal melalui sistem manajemen strategis.

Dengan berbagai defenisi Pemberdayaan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

f. Konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan beroeran dalam memwujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai rakyat, tanpa mengabaikan peran Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 20098 Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif untuk orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagai mana dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha dan fasilitas yang

memadai untuk pemberdayaan UMKM.

Berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 2 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah, asas-asas UMKM, di antaranya :

1. Asas kekeluargaan, yaitu asas yang melandasi upaya pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
2. Asas demokrasi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. Asas kebersamaan, yaitu asas mendorong peran seluruh UMKM dan dunia usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
4. Asas efisiensi berkelanjutan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan UMKM dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
5. Asas keberlanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan UMKM yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
7. Asas kemandirian yaitu asas pemberdayaan UMKM yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian UMKM.
8. Asas keseimbangan kemajuan, adalah asas pemberdayaan UMKM

yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

9. Asas kesatuan ekonomi nasional, adalah asas pemberdayaan UMKM yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

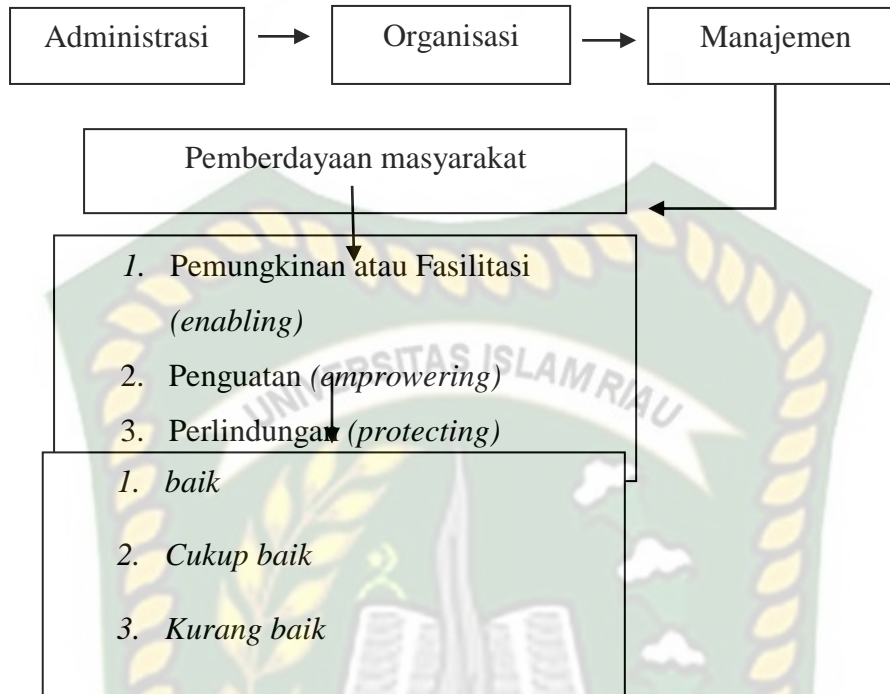
Selanjutnya berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, prinsip dan tujuan pembedayaan UMKM sebagai berikut :

1. Prinsip pemberdayaan UMKM :
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan kerkeadilan.
 - c. Pembangunan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.
 - d. Peningkatan daya saing UMKM.
 - e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengadilan secara terpadu.
2. Tujuan pemberdayaan UMKM :
 - a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.
 - b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 - c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengetasan rakyat dan kemiskinan.

B. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan penulis memberikan pemahaman kepada pembaca dalam melihat pemberdayaan usaha mikro kecil penelitian penulis maka penulis membuat gambaran kerangka pikiran penelitian sebagai berikut :

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017



Sumber : Modifikasi Peneliti, Tahun 2019

C. Konsep Operasional

Untuk memperoleh penelitian dan untuk menetralsir kesalah pahaman dalam penelitian ini, maka perlu dioperasikan lebih lanjut sesuai data empiris yang dibutuhkan dalam pengukuran variabel. Adapun konsep itu adalah :

- a. Administrasi adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari semua negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. (Siagian 2003; 7)
- b. Organisasi merupakan suatu wadah dari unsur-unsur administrasi yang lainnya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. (Darwis, dkk 2008; 11)
- c. Manajemen merupakan proses merencanakan, menorganisasikan dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Stoner (dalam Zulkifli,2005;28)
- d. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia. Fathoni (2006;10)
- e. pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Sumodiningrat (dalam Aprillia Theresisa, 2015; 93)
- f. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat,

mendorong pertumbuhan ekonomi, dan beroperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

- g. Dinas Daerah adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah. Daerah dapat berarti provinsi, kabupaten atau kota. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi: prumusan kebijakanteknis sesuai dengan lingkup pelaksanaan pelayanan umum, serta pembiaian pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- h. Pemungkinan atau Fasilitasi(*enabling*) suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.
- i. Penguatan (*empowering*)Yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri.
- j. Perlindungan (*Protecting*)Melindungi masyarkat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat,pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil.

D. Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Penelitian Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017.

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Sumodiningrat (dalam Aprillia Theresisa, 2005; 93)	Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak	1. Pemungkinan atau Fasilitasi (<i>enabling</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM • Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi • Memfasilitasi jaringan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal

1	2	3	4	5
	2. Penguatan (<i>empowering</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pelatihan kewirausahaan dan Manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM • Memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (information, communication, technology) bagi UMKM • Memberikan bimbingan peningkatan mutu produk UMKM 		<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal
	3. Perlindungan (<i>protecting</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan atas sertifikat halal • Perlindungan atas sertifikat hak merek • Perlindungan atas sertifikat Produksi Pangan (SPP-IRT) 		<ul style="list-style-type: none"> • Ordinal • Ordinal • Ordinal

Sumber : Modifikasi Penulis, Tahun 2019

E. Teknik Pengukuran

Penelitian terhadap setiap indikator ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono 2003;107). Teknik pengukuran terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga kategori) yaitu : Baik, Cukup Baik dan Kurang Baik. Masing-masing pertanyaan diberikan 3 kategori alternatif jawaban tersebut dan setiap jawaban diberi bobot skor sebagai berikut :

- a. Baik dengan bobot skor : 3
- b. Cukup baik dengan bobot skor : 2
- c. Kurang baik dengan bobot skor : 1

Rumus :

Skor tertinggi = Jumlah responden x Bobot skor tertinggi = Skor indikator

Skor indikator = Skor indikator x jumlah item penilaian (pertanyaan)

Total Skor/Skor indikator x 100 = %

Catatan :

20 Pelaku usaha mikro kecil

Berdasarkan penjelasan diatas diatas didapatkan penghitungan rumus sebagai berikut :

Skor Tertinggi : $20 \times 3 = 60$

Skor Indikator : $60 \times 3 = 180$

$$\frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100 = \%$$

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian

setiap indikator.

1. Ukuran Variabel

Baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. 67-100%.

Cukup baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak 34-66%.

Kurang baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak 1-33%.

2. Ukuran Indikator Variabel

a. Pemungkinan (*enabling*)

suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal, harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang menghambat.

Baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 67-100%.

Cukup baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada

pada total skor 34-66%.

Kurang baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 1-33%.

b. Penguatan (*empowering*)

Yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri.

Baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 67-100%.

Cukup baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 34-66%.

Kurang baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 1-33%.

c. Perlindungan (*Protecting*)

Harus melindungi masyarakat agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

Baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 67-100%.

Cukup baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 34-66%.

Kurang baik : apabila jawaban responden terhadap indikator Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Berada pada total skor 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan penelitian dalam menghimpun informasi awal tentang pendapat responden terhadap pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Adapun metode penelitian ini peneliti menggunakan metode Kuantitatif. Menurut Sugiono (2012:13) metode penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

penelitian ini menggunakan pendekatan survei deskriptif, dimana menggunakan sampel/responden sebagai sumber data yang utama dan juga merupakan alat kumpul data yang penting dan metode kuisisioner/ wawancara. Data yang diperoleh dari masalah-masalah yang terdapat dalam survei atau pada saat penelitian dengan survei deskriptif tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisa Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil oleh Dinas koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

B. Lokasi Penelitian

Tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian sesuai dengan judul penelitian dan sangat relevan dengan permasalahan yang diajukan adalah Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Dimana masih banyaknya kendalanya seperti Mutu kelembagaan KUKM yang kurang baik karena terjadinya peningkatan jumlah Usaha Mikro Kecil (UMK) pada tahun 2016-2017 di setiap Kecamatan di Kabupaten Siak. Masih Kurang kompetensi dan kualitas dari SDM aparatur atau pembina dibidang UKM, dikarenakan mayoritas SDM yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak masih terbatas jumlah pegawai sehingga adanya Pelaksana yang merangkap 2 (dua) jabatan di 2 (dua) Seksi yaitu seksi UMKM dan seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan. dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga perlu ditingkatkan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan juga kurangnya pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan kebijakan prinsip-prinsip kewirausahaan, tingkat kesejahteraan jenis UMK di 2 (dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ini melalui pendapatan Per-Tahun masih kurang optimal. dan hal inilah yang menjadi Kendala di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam melakukan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil (UMK)

C. Populasi dan Sampel

a. Populasi

menurut Sugiyono (2012:389) populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

b. Sampel

Menurut sugiyono (2012:389) sampel adalah sebagian dari populasi itu..

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Koperasi UMKM, Kepala Bidang UMKM, Kepala Seksi UMKM, Kepala Seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraandan juga masyarakat yang mengelolah Usaha Mikro Kecil.

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Pegawai Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

No	Unit Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Koperasi, UMKM	1	1	100%
2	Kabag Bidang UMKM	1	1	100%
3	Kepala seksi UMKM	1	1	100%
4	Kepala Seksi Pemasaran,Permodalan dan kemitraan	1	1	100%
	Jumlah	4	4	100%

Sumber : Dinas Koperasi,UMKM Kabupaten Siak, Tahun 2019

Tabel III.2 : Jumlah Populasi dan Sampel Masyarakat Pengelolah Usaha Mikro Kecil Kecamatan Siak-Mampura.

NO	Unit Sampel	Kecamatan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Makanan Cake	Siak	2	2	100%
2	K. Bawang	Siak	2	2	100%
3	Salad	Siak	2	2	100%
4	Keripik	Siak	3	3	100%
5	Jelly	siak	2	2	100%
6	Wedang Jahe	Mampura	3	3	100%
7	Kerajinan	Mampura	3	3	100%
8	Dodol	Mampura	1	1	100%
9	Minuman	Mampura	1	1	100%
10	Kerupuk	Mampura	1	1	100%
	Jumlah		20	20	100%

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Siak 2017.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi . Adapun penarikan sampel dalam Analisis Pemeberdayaan Usaha Mikro, Kecil Oleh Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Siak, penarikan sampel untuk Kepala Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Siak. dilakukan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara Sensus. Menurut Sugiono (2012;73) adalah bagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul *representative* (Mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi.

Kemudian penarikan sampel untuk Pelaksana UMKM Kabupaten Siak. Selaku Anggota UMKM yang melakukan kegiatan turun kelapangan dilakukan dengan menggunakan teknik Random Sampling. Menurut Sugiyono (2003;74-78) Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari objek atau responden yang akan diteliti, seperti Kepala Dinas, Kepala Bagian Bidang UMKM, Kepala Seksi UMKM, Kepala Seksi Pemasaran, Permodalan dan kemitraan. Serta masyarakat yang mengikuti pelatihan manajemen kewirausahaan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Dengan memperoleh data berupa tanggapan responden terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh Dins tersebut.

b. Data Skunder

Data skunder merupakan sumber informasi data informasi ataupun keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, UMKM. Data perlengkapan yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya lewat orang lain atau dengan menggunakan dokumen. Data ini juga dapat berupa arsip, literatur, laporan, ataupun petunjuk pelaksanaan mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Siak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Teknik Kuisisioner

yaitu peneliti membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis berkaitan dengan variabel penelitian dan kemudian disebarkan kepada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, untuk menggali informasi tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Oleh Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. hasil dari teknik kuisisioner ini dapat diketahui dengan menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap program tersebut.

b. Teknik Observasi

Yaitu suatu teknik memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap para masyarakat yang mengikuti pembinaan atau pelatihan yang dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, UMKM tersebut.

Untuk mengumpulkan data dan melihat fenomena yang terjadi pada program pembinaan yang dilakukan, sehingga data yang dikumpulkan akan semakin lengkap.

c. Teknik Wawancara

Yaitu suatu teknik untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang akan ditujukan kepada responden mengenai program Pembinaan yang dilaksanakan Oleh Dinas Koperasi, UMKM Kabupaten Siak. Dengan tujuan mendapat informasi dan data yang tepat dari para responden. Untuk melengkapi data dan informasi, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur ataupun tidak terstruktur.

d. Teknik Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data-data mengenai, pelakasa kegiatan pembinaan, sejarah singkat lokasi penelitian, serta dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, juga dilengkapi dengan foto.

G. Teknik Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data tersebut dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang permasalahan berdasarkan kenyataan dilapangan secara tepat.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.3 : Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke-																															
		april				mei				Juni				juli				agustus				septembe r				oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusun UP	■	■	■	■																												
2	Seminar UP					■	■	■	■																								
3	Revisi UP									■	■	■	■																				
4	Revisi Kuisisioner													■	■	■	■																
5	Rekomend asi Survey																	■	■	■	■												

6 Survey Lapangan

7 Analisis Data

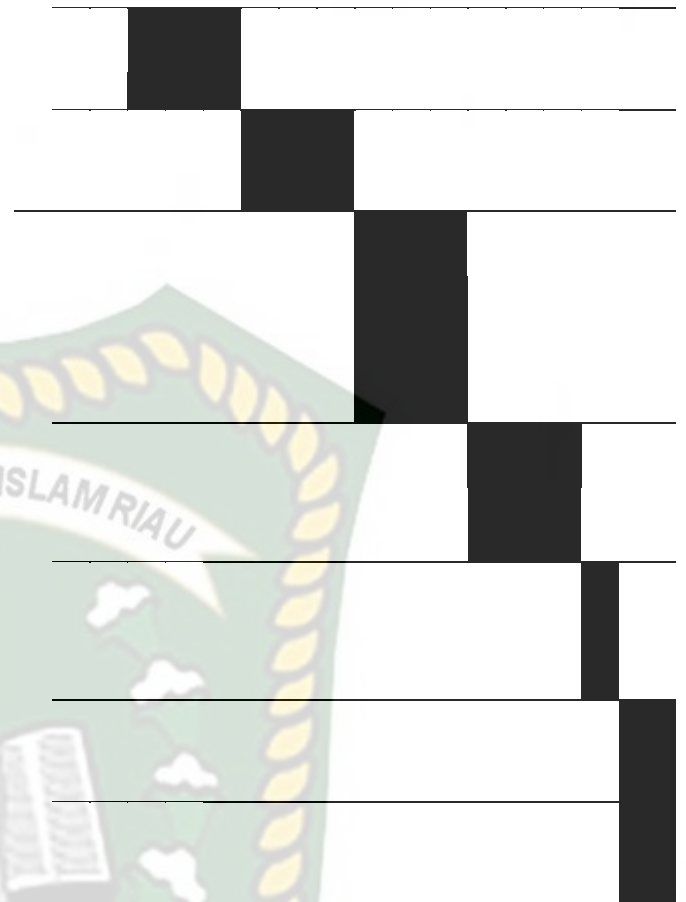
8 Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)

9 Konsultasi Revisi Skripsi

10 Ujian Komferehensif

11 Revisi Skripsi

12 Penggandaan Skripsi



Sumber: Modifikasi Penulis Tahun 2019



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Profil Kabupaten Siak

Kabupaten siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Sebelumnya kawansan ini merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Di awal kemerdekaan, sultan kasim II, merupakan sultan siak terakhir menyatakan kerjaanya bergabung dengan Republik Indonesia. Kemudian wilayah kewedanan siak dibawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah menjadi kecamatan siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura.

2. Gambaran Umum letak Geografis Kabupaten Siak

Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km² dan Kabupaten ini membawahi 14 kecamatan dan 57 kelurahan. Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah pada tahun 2010 adalah sebagai berikut : Kecamatan Bunga Raya 20.900 jiwa, Kecamatan Dayun 26.600 jiwa, Kecamatan Kandis 58.700 jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 22.900 jiwa, Kecamatan Koto Gasib 18.900 jiwa, Kecamatan Siak 21.400 jiwa, Kecamatan Sabak Auh 9.900 jiwa, Kecamatan Tualang 104.000 jiwa, Kecamatan Minas 25.800 jiwa, Kecamatan Sungai Apit 25.000 jiwa, Kecamatan Pusako 5.100 jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 17.000 jiwa, Kecamatan

Sungai Mandau 7.200 jiwa, Kecamatan Mampura 14.100 jiwa. Secara geografis siak terletak pada koordinasi 10 16' 30"- 00 20'49" Lintang Utara dan 100 54' 21" 102° 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik georgaris memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan Indonesia – Malaysia – Siangapura. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Uatar berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kepulauan Meranti
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pelalawan
- Sebelah Barat berbatasa dengan Kampar dan Kota Pekanbaru

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di Indonesia, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi terutama sebagai sarana tranportasi dan perhubungan. Selain sungai siak, daerah ini juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu : sungai mandau, sungai gasib, sungai limau, sungai apit, sungai, tengah, sungai rawa, sungai buatan dan sungai bayam. Sedangka danau-danau yang tersebar di daerah ini yaitu : danau katialau, danau air hitam, danau tembatu sosang, danau pulau besar, danau zamrud, danau pulau bawah, danau pulau atas dan tasik rawa.

Bentang alam kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur

tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° – 32° Celcius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober sampai bulan Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Distribusi curah hujan semakin tinggi ke arah bukit barisan dibagian barat wilayah Provinsi Riau.

3. Keadaan Penduduk Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan kabupaten yang sedang berkembang dibidang wisata sehingga menjadi salah satu kota tujuan wisata bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Siak. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kabupaten siak. Pemerintah Kabupaten Siak harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan mulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk Kabupaten Siak tetap terjamin.

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

Dinas koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Siak memegang penting peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro kecil dan menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integrasi ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategi untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang mangkin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati No 76 Tahun 2016. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi UMKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program,
- b. pelaksanaan program,
- c. pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan manajemen dan usaha terhadap para pengusaha UMK
- d. fasilitasi perkuatan permodalan dan pembiayaan
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain di bidang UMKM

C. Visi, Misi, Tujuan dan strategi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.

1. Visi dan Misi Dinas Koperasi UMKM

Visi : Terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta menjadi tujuan pariwisata di Sumatera.

Misi : Mewujudkan Perekonomian daerah yang mandiri dan berdaya saing

2. Tujuan Dinas Koperasi UMKM

Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM secara umum adalah menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian yang berdaya saing. Tujuan Dinas Koperasi dan UMKM selama Periode 2016-2021 dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
- b. Meningkatkan Koperasi aktif
- c. Meningkatkan produk UMKM yang berkualitas
- d. Meningkatkan kinerja dan pelayanan dinas

3. Strategi Dinas koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi dan UMKM telah melaksanakan pengembangan Koperasi dan UMKM agar mampu menjadi pelaku utama dalam perekonomian daerah.

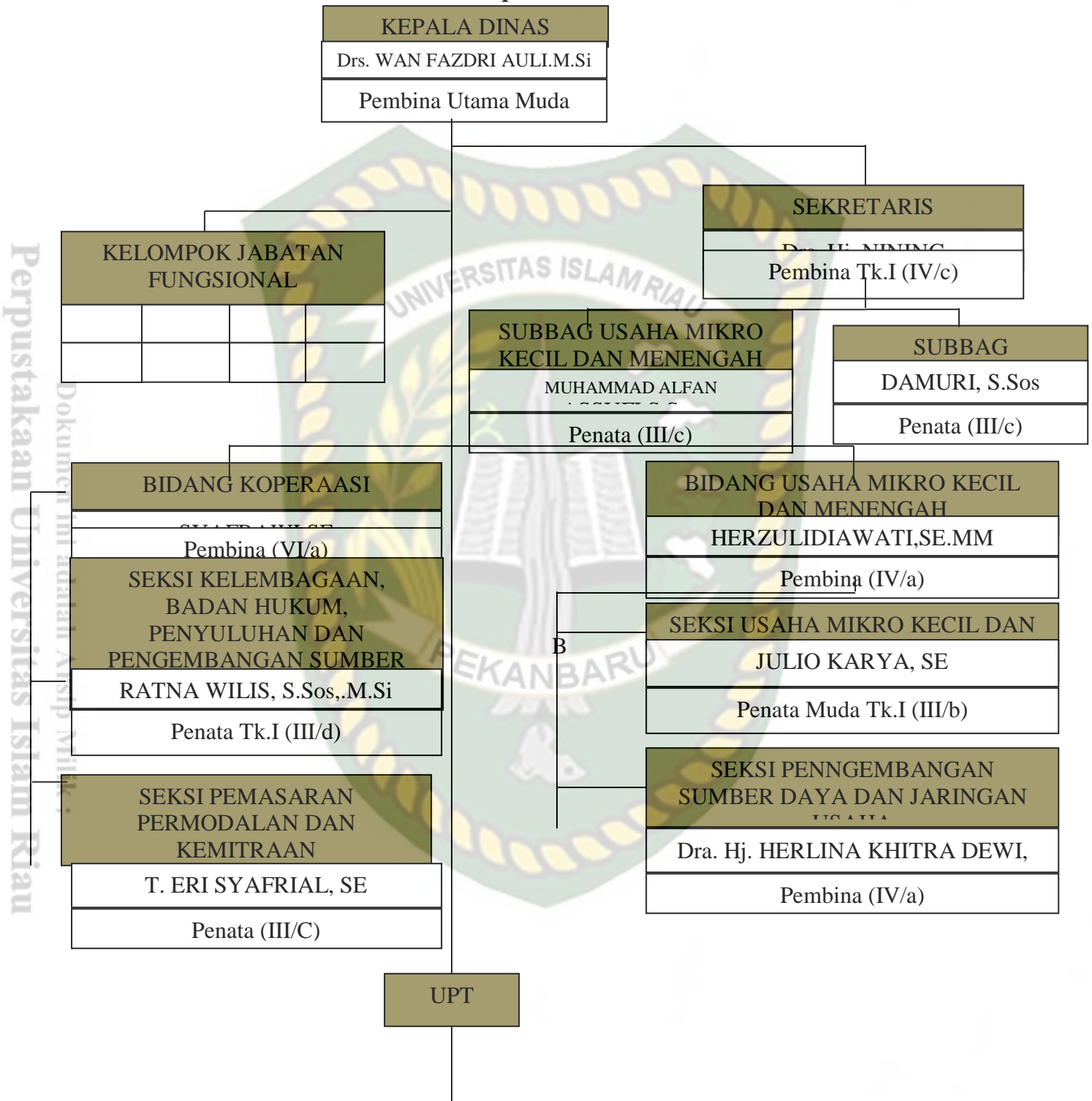
Upaya dan langkah-langkah strategi pengembangan Koperasi dan UMKM akan terus dilaksanakan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan pada masa mendatang. Adapun strategi pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas Koperasi dan UMKM sesuai dengan peraturan yang berlaku
- b. Pengembangan gerakan masyarakat sadar koperasi (Gemaskop)
- c. Meningkatkan permodalan bagi Koperasi dan UMKM dan peningkatan jaringan pemasaran dan produksi Koperasi dan UMKM.
- d. Peningkatan keahlian dan keterampilan pengurus/pengelola koperasi dan UMKM melalui pelatihan berbasis manajerial dan kompetensi.
- e. Pengembangan komunikasi dan media masa

D. Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016. Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (STOK) perangkat daerah Kabupaten Siak, Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Memengah Kabupaten Siak, Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016.



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak Tahun 2019

Berdasarkan bangan struktur organisasi, maka susunan organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subbag Perencanaan dan Umum
 - b. Subbag Keuangan dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi
 - a. Seksi Kelembagaan Badan Hukum, Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Seksi Pemasaran dan Permodalan
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - a. Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaringan Usaha

Ada pun tugas dan fungsi masing-masing organisasi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
 - a. Kepala dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Koperasi dan UMKM.
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan UMKM
 - c. Penyelenggaraan pelayanan umum di Bidang Koperasi dan UMKM
 - d. Pelaksanaan uruasan tata usaha dinas
2. Sekretaris
 - a. Penyusunan rencangan kebijakan dinas
 - b. Pengoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD
 - c. Penyusunan program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan

- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan
 - f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja
 - g. Pengordinasian penyusunan standar operasi prosedur (SOP) kegiatan dinas
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas
3. Sub Bagian perencanaan dan Umum
- a. Menyusun kegiatan surat menyurat
 - b. Melakukan kegiatan kearsipan dan ekspedisi
 - c. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (Renstra)
 - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan
 - f. Melakukan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAPKIP)
 - g. Melaksanakan penyimpanan bahan dan penyusunan RKA/DPA
 - h. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan
 - i. Mengevaluasi hasil program kerja
 - j. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja
4. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
- a. Mengendalikan rencana tahunan
 - b. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahun
 - c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penganalisan dan penyajian data statistik serta informasi
 - e. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian
 - f. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - g. Membuat pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum

- h. Melaksanakan penbendaharaan keuangan
- i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas
- j. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna Anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati
- k. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi
- l. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran
- m. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan
- n. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinasi laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK)
- o. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam meningkatkan produktivitas kerja
- p. Mengelola administrasi aset daerah dilingkup tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- q. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara
- r. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P/LHKPN/LHKA
- s. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara

5. Bidang Koperasi

Bidang koperasi mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pembinaan kelembagaan, pengembangan jaringan usaha, memfasilitasi pembiayaan koperasi

dan penyuluhan. Bidang koperasi terdiri dari : Seksi kelembagaan, badan hukum, penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia dan seksi pemasaran permodalan dan kemitraan. Bidang ini mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang koperasi
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis dibidang koperasi
- c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian dibidang koperasi
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi lain bidang koperasi

6. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari : Seksi UMKM dan juga Seksi SDM dan Jaringan Usaha. Bidang ini mempunyai tugas :

- a. Penyusunan rencana program teknis dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang UMKM
- c. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, bimbingan manajemen dan usaha terhadap para pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Fasilitasi perkuatan permodalan dan pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

E. Kepegawaian

1. Menurut Satuan Kerja

Pegawai Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak terdiri dari satu orang Kepala Dinas. Satu orang Sekretaris dan dua Kepala Bidang yang masing-masing membawahi dua Seksi dan beberapa Staf. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel baerikut :

Tabel 1V.1 : Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Menurut Satuan Kerja Tahun 2019

No	Satuan Kerja	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Sub Bagian	2
4.	Kepala Bidang	2
5.	Kepala Seksi	4
6.	Staf Sub Bagian	4
7.	Staf Bidang UMKM	2
8.	Staf Bidang Koperasi	3
Jumlah		19

Submber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak 2019

2. Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang dimiliki pegawai pada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, dari tingkat sekolah Menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan pegawai di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 1V.2 : Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Strata dua (S2)	5
2.	Strata satu (S1)	8
3.	SMA	6
JUMLAH		19

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak 2019

3. Menurut Pangkat dan Golongan

Pegawai negeri Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dilihat dari golongan dan pangkatnya terdiri dari 9 (Sembilan) kepangkatan mulai dari yang tertinggi yaitu golongan IV c hingga yang terendah yaitu golongan II c. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1V.3 : Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	VI c	1
2.	VI b	1
3.	IV a	3
4.	III d	3
5.	III c	4
6.	III b	1
7.	III a	1
8.	II d	1
9.	II c	4
Jumlah		19

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Siak 2019

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam bab ini akan disajikan data hasil penelitian yang telah dilakukan berupa hasil kusioner tentang indikator Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017.

Dalam penyajian data hasil penelitian ini diuraikan berbagai aspek yaitu, profil responden. Data ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden sehingga dapat memahami situasi pelaku Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Siak. Kedua, gambaran penilaian Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak. Ketiga, deskripsi hasil kusioner yang disebarkan pada responden dilanjutkan dengan analisis data yang sudah diperoleh dipadukan dengan hasil wawancara yang diperoleh dari responden. Data responden meliputi pertanyaan tentang jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir kepada semua responden yang terpilih.

1. Jenis Kelamin

Jenis kelamin adalah unsur genetika dari para responden yang menilai Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro

Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017 , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Penelitian Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

No	Responden	Jenis Kelamin	Presentase (%)
1	Laki-Laki	6	25%
2	Perempuan	18	75%
		24	100%

Sumber: Olahan Data Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas diketahui bahwa dari 24 orang responden sebanyak 6 orang atau 25% adalah responden laki-laki dan 18 orang atau 75% adalah responden perempuan.

2. Berdasarkan Usia

Usia responden yang telah ditetapkan dalam penelitian untuk mengetahui Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel V.2 : Responden Berdasarkan Usia/Umur pada Penelitian Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
1.	20-30	3	12.5%
2.	31-40	12	50%
3.	41-50	7	29.2%
3.	51>	2	8.3 %
	Jumlah	24	100%

Sumber : Olahan Data Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-30 tahun sebanyak 3 orang responden dengan presentase 12.5% dari jumlah responden, sedangkan responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 12 orang responden dengan presentase 50% dari jumlah responden, sedangkan responden yang berusia 41-50 sebanyak 7 orang responden dengan persentase 29.2% dan responden yang berusia lebih 51> tahun sebanyak 2 orang responden dengan presentase 8.3% dari seluruh jumlah responden.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terakhir responden yang melakukan penilaian terhadap Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017.

Tabel V.3 : Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Penelitian Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

No	Responden	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1.	SD	1	4.2%
2.	SMP		
3.	SMA	13	54.2%
4.	S1	6	25%
5.	S2	4	16.6%
	Jumlah	24	100%

Sumber : Olahan Data Hasil Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari tingkat pendidikan responden sangat bervariasi untuk responden yang pendidikan SD sebanyak 1 orang dengan presentase 4.2% dari jumlah responden, SMA sebanyak 13 orang dengan presentase 54.2% dari jumlah responden, S1 sebanyak 6 orang dengan presentase

25% dari jumlah responden, S2 sebanyak 4 orang dengan presentase 16.6% dari jumlah responden.

B. Hasil Penelitian Terhadap Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pemberdayaan masyarakat terutama dalam memberikan pembinaan dalam bidang manajemen kewirausahaan pemberdayaan yang dilakukan yaitu dalam bidang meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan mutu kemasan, manajemen pembukuan, manajemen pemasaran dan meningkatkan mutu label pada kemasan. Untuk mewujudkan itu semua pemerintah daerah Kabupaten Siak Khususnya Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi UMKM, Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Jaringan Usaha yang memiliki wewenang untuk melaksanakan, membina dan mengawasi kegiatan pembinaan usaha mikro kecil dan Menengah di setiap Kecamatan agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Setelah melakukan observasi penelitian dilokasi Kabupaten Siak khususnya kecamatan Siak-Mampura oleh peneliti ditemukan beragam permasalahan yang dijumpai dilokasi, hal ini perlu adanya pembinaan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah oleh kepala bidang usaha mikro kecil dan menengah, dan peningkatan kualitas pembinaan terhadap pengelola usaha mikro kecil dan menengah dengan demikian diperlukan Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017, dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator sebagai berikut :

1. Pemungkinan atau Fasilitasi (*Enabling*)
2. Penguatan (*empowering*)
3. Perlindungan (*Protecting*)

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017 untuk itu ditelaah satu persatu untuk mengetahui seberapa baik pemberdayaan Usaha Mikro Kecil yang ada di Kabupaten Siak.

1. Pemungkinan atau Fasilitasi (*enabling*)

Pemungkinan atau fasilitasi merupakan salah satu pola pendukung atau pendampingan dalam upaya memberikan kemudahan dan akses bantuan, kepada siapa saja untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang harus dilakukan oleh dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah sehingga dalam kegiatan fasilitasi yang dilakukan dapat berkembang sesuai dengan potensi masyarakat di kabupaten siak.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berada di Kabupaten Siak dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 : Distribusi Jawaban Responden(Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Pemungkinan atau Fasilitasi.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	4	12	4	20
2.	Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi	4	10	6	20
3.	Memfasilitasi jaringan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	6	6	8	20

Sumber Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.5 diatas disimpulkan bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator pemungkinan atau fasilitasi yang terdiri dari tiga penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan baik pada item penilaian yang pertama yaitu 4 orang responden, yang menyatakan cukup baik berjumlah 12 orang dan yang menyatakan kurang baik 4 orang responden.

Pada item yang kedua yaitu fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi dengan jawaban responden yang menyatakan baik 4 orang, yang menyatakan cukup baik 10 orang dan yang menyatakan kurang baik 6 orang responden.

Pada item yang ketiga yaitu Memfasilitasi jaringan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah dengan jawaban responden yang menyatakan baik 6 orang, yang menyatakan cukup baik 6 orang dan yang menyatakan kurang baik 8 orang responden.

Tabel V.4a : Analisis Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Pemungkinan atau Fasilitas.

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penelitian			
		Baik	Cukup	Kurang	lalah
		Skor (3)	Skor(2)	Skor(1)	
1	2	3	4	5	6
1.	Memfsilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM	12	24	4	40
2.	Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksi	12	20	6	38
1	2	3	4	5	6
3.	Memfasilitasi jaringan permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah	18	12	8	38
Total Skor					116

Sumber Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.4a diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor Tertinggi} : 20 \times 3 = 60$$

$$\text{Skor Indikator} : 60 \times 3 = 180$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100$$

$$= \frac{116}{180} \times 100 = 64.4 \%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai pemungkinan atau fasilitasi pemberdayaan usaha mikro kecil dikabupaten siak sebanyak 64.4% sehingga dapat dikatakan cukup baik karena berada dikisaran 34-66%.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis Kepala Bidang UMKM Kabupaten Siak yaitu ibu Herzulidianti, SE.,MM, pada tanggal 12 Agustus 2019 mengenai indikator Pemungkinan atau Fasilitasi :

“ sejauh ini setiap kegiatan yang berhubungan dengan pemungkinan atau fasilitasi semua berjalan dengan baik mulai dari peningkatan kemitraan, pengembangan sarana promosi lalu hingga jaringan permodalan, jika berhubungan dengan peningkatan kemitraan kami terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku umkm, tentang kemitraan kami terus melakukan sosialisasi kepada para pelaku umkm, tentang kemitraan kami dengan pihak permodalan seperti PTPN V yang memberikan pinjaman tanpa bunga, untuk meningkatkan jumlah umkm kami selalu mensosialisasikan ini dan kendala dimasyarakat adalah permodalan. Lalu jika berkaitan dengan pengembangan sarana promosi kami selalu memberi jalan agar para umkm dapat mempermosikan produknya dengan menghadirkan para pelaku umkm pada event-event yang diselenggarakan pemkab siak, seperti tour de siak, pameran kabupaten, riau exspo. Dll. Lalu dengan jaringan permodalan kami hanya memfasilitasi syarat-syarat administrasi dokumen saja untuk mempermudah pelaku umkm dalam mengajukan pinjaman, seperti jaminan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kami juga sudah berkerjasama dengan Bankn BNI, BRI, Bank Riau dan PTPN V, dan ada juga bantuan dana hibah dari kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimana dana ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada pelaku pemula umkm tanpa harus mengembalikan, akan tetapi sekarang ini dana hiba tersebut hanya akan diberikan kepada masyarakat yang ada dipesisir dengan persyaratan tertentu”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu bapak Julio Karya, SE pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai indikator Pemungkinan atau fasilitasi :

“mengenai indikator pemungkinan atau fasilitasi semua sudah berjalan sesuai dengan arahan dari atasan, setiap tahunnya kami selalu melakukan promosi-promosi untuk mengenalkan produk umkm kabupaten siak kepada masyarakat melalui iwent-ivent tahunan yang di adakan pemkab siak. Tentu hal ini sangat dibutuhkan para pelaku umkm agar usahanya dikenal oleh masyarakat melalui promosi-promosi seperti ini, bahkan informasi yang kami berikan kepada pelaku umkm juga sudah kesetiap kecamatan kami beritahukan agar masyarakat pelaku umkm di kecamatan lain yang ada dikabupaten siak tahu akan event-event yang kami adakan, sehingga mereka ikut serta dalam memerkan produk-produk mereka”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala seksi pengembangan sumber daya dan jaringan usaha yaitu ibu Dra. Hj. Herlina Khitra Dewi, M.Pd. pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai indikator Pemungkinan atau fasilitasi:

“arahan yang diberikan atasan sudah sangat jelas, kami selalu berkerja sesuai arahan yang diberikan atasan. mengenai fasilitasi jaringan permodalan kami melakukan kerjasama dengan bayak pihak mulai dari BRI, BNI, PTPN V, Bank Riau. Lalu dengan adanya kerja sama yang kami lakukan ini kami harapkan bisa meningkatkan produk umkm baik yang masih pemula ataupun yang sudah berjalan agar bisa mengembangkan lagi usahanya, kami selalu merekomendasikan kepada pelaku ukm untuk melakukan pinjaman kepada bank-bank yang kami rekomendasikan ini”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi/pengamatan yang penulis lakukan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang berada dikabupaten siak yang berjumlah 20 orang reponden dengan hasil pengamatan penulis mengenai pemungkinan atau fasillitasi kegiatan sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tanggapan responden tetapi rata-rata responden dalam menanggapi indikator tentang pemungkinan atau fasilitasi kegiatan sebagai berikut .:

“mengenai fasilitasi masih banyaknya kekurangan-kekurangan dari Dinas Koperasi UMKM Kab. Siak, salah satunya mengenai fasilitasi peningkatan kemitraan sejauh ini sudah ada dirasakan oleh kami para pelaku umkm untuk memajukan usaha kami salah satunya dengan adanya kerja sama dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah kab. Siak

dengan pihak Bank seperti Bank BRI untuk permodalan dengan bunga rendah. akan tetapi kami belum mampu meminjam karena sulitnya terhadap angsuran dan syarat-syarat peminjaman, sementara itu hasil penjualan umkm kami belum bisa menutupi untuk angsuran dibank. Mengenai saran promosi sejauh ini kami pelaku umkm selalu di diberitahu oleh dinas koperasi dan umkm ketika ada event-event yang diselenggarakan Pemkab Siak, seperti tour de siak, pameran kabupaten dll. akan tetapi hanya sebagian dari pelaku umkm saja yang tahu akan informasi tersebut sebagian pelaku umkm tahu ada event-event ketika sedang berada disekitaran event-event tersebut.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dilokasi penelitian serta data yang diberikan oleh responden dari indikator Pemungkinan atau Fasilitas masih cukup baik, hanya saja sasaran yang dituju tidak semua masyarakat pelaku umkm melakukannya karena informasi yang penulis dapatkan dilapangan hasil pendapatan penjualan mereka tidak cukup untuk membayar angsuran dan juga syarat-syarat peminjaman, harus adanya izin usaha mikro dan Kecil (IUMK) sementara itu hasil penjualan umkm belum bisa menutupi untuk angsuran dibank dikarenakan pendapatan mereka masih rendah..

Dari uraian data tabel V.4a, data hasil wawancara / Kuisisioner serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan pemungkinan atau fasilitas merupakan salah satu pola pendukung atau pendampingan dalam upaya memberikan kemudahan dan akses bantuan, fasilitas yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi umkm, memfasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi, memfasilitasi jaringan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Siak sudah melakukan pemungkinan atau fasilitas yang telah diuraikan diatas,

walaupun masih adanya kekurangan, akan tetapi indikator pemungkinan atau fasilitasi menurut penulis berada pada kategori cukup baik karena sudah berusaha memberikan kontribusi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil di Kabupaten Siak.

2. Penguatan (*empowering*)

Yaitu dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri. Hasil tanggapan responden tentang indikator penguatan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil di Kabupaten Siak dapat dilihat ditabel dibawah sebagai berikut :

Tabel V.5 : Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mirko Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Penguatan (*empowering*).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Peneilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Memberikan pelatihan kewirausahaan dan Manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM	6	8	6	20
2.	Memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (information, communciation, technology) bagi UMKM	4	12	4	20
3.	Memberikan bimbinganpeningkatan mutu produk UMKM	5	8	7	20

Sumber Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.5 diatas disimpulkan bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator penguatan (*empowering*) yang terdiri dari tiga penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan baik pada item penilaian yang pertama yaitu 6 orang responden, yang menyatakan cukup baik berjumlah 8 orang dan yang menyatakan kurang baik 6 orang responden.

Pada item yang kedua yaitu memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (information, communication, technology) bagi UMKM dengan jawaban responden yang menyatakan baik 4 orang, yang menyatakan cukup baik 12 orang dan yang menyatakan kurang baik 4 orang responden.

Pada item yang ketiga yaitu memberikan bimbingan peningkatan mutu produk UMKM dengan jawaban responden yang menyatakan baik 5 orang, yang menyatakan cukup baik 8 orang dan yang menyatakan kurang baik 7 orang responden.

Tabel V.5a : Analisis Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Penguatan (*empowering*).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penelitian			Jumlah
		Baik Baik Skor (3)	Cukup Baik Skor(2)	Kurang Baik Skor(1)	
1.	Memberikan pelatihan kewirausahaan dan Manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM	18	16	6	40
2.	Memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (information, communication, technology) bagi UMKM	12	24	4	40
3.	Memberikan bimbingan peningkatan mutu produk UMKM	15	16	7	38
Total Skor					118

Sumber Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.5a diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor Tertinggi} : 20 \times 3 = 60$$

$$\text{Skort Indikator} : 60 \times 3 = 180$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100$$

$$= \frac{118}{180} \times 100 = 65.5\%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai penguatan (*empowering*) pemberdayaan usaha mikro kecil dikabupaten siak

sebanyak 65.5% sehingga dapat dikatakan cukup baik karena berada dikisaran 34-66%.

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang UMKM Kabupaten Siak yaitu ibu Herzulidianti, SE.,MM, pada tanggal 12 Agustus 2019 mengenai indikator penguatan :

“Mengenai sosialisasi memeberikan pelatihan kewirausahaan dan manajemen kami lakukan ini setiap tahunnya dengan kami datangkan narasumber yang berkompeten dibidang ini, dan juga salah satunya kami mengadakan pelatihan ini karna adanya program dari kementerian koperasi usaha mikro kecil dan menengah adanya dana hibah yang diberika kepada pelaku usaha pemula, salah satu syaratnya yang mengikuti pelatihan-pelatihan ini. Mengenai pelatihan pemanfaatan ICT (information, communication, technology) kami sudah melakukannya pada tahun 2018 dengan mengundang nara sumber ombertus yang jago dalam bidang jual beli onlien penulis buku juga di marketing nonjok di jakarta, dan kami panggil beliau untuk membagikan ilmunya dibidang jual beli onlien kepada pelaku usaha pemula dan juga memberikan pengetahuan tentang pembukuan secara sederhana. Lalu mengenai mutu produk kami selalu mendorong pelaku umkm untuk berfikir kreatif dalam mengelolah produk umkm mereka dalam hal kemasan dan produk olahan makanannya misalkan dodol dulu dodol hanya ada beberapa rasa, kami berimasukan kepelaku umkm untuk menambah varian rasa seperti rasa nangka, rasa nanas, rasa pisang, dan tidak Cuma itu contoh kemasan kami ajukan kepada mereka pelaku umkm yang higienis dan juga label atau merek produk kami berikan masukan tekadang kami desainkan merek produk mereka. Dengan demikian dengan adanya mutu dari produk umkm tersebut pemasaran mereka bisa lebih luas lagi dan agar terjaminnya mutu produk pelaku umkm dipasarkan dan juga kami selalu memonitoring kesetiap pelaku umkm setelah selesai pelatihan guna mengetahui apakah ada kendala pelaku umkm dalam mengimplementasikan petihan tersebut”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu bapak Julio Karya, SE pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai indikator Penguatan :

“mengenai indikator penguatan pada tahun 2018 kami memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (informationm communiction, technology)

dengan mengundang nara sumber ombertus yang jago dalam bidang jual beli onlien penulis buku juga di marketing nonjok di jakarta, dan kami panggil beliau untuk membagikan ilmunya dibidang jual beli onlien kepada pelaku usaha pemula dan juga memberikan pengetahuan tentang pembukuan secara sederhana, hal ini kami melakukan agar pelaku ukm mampu memasarkan produknya secara onlien untuk memajukan usahanya tersebut”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala seksi pengembangan sumber daya dan jaringan usaha yaitu ibu Dra. Hj. Herlina Khitra Dewi,M.Pd. pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai indikator Penguatan:

“arahan yang diberikan atasan sudah sangat jelas, kami selalu berkerja sesuai arahan yang diberikan atasan. Mengenai penguatan kami selalu memonitoring pelaku ukm dan juga kami selalu memberikan bimbingan atau pelatihan mutu produk umkm, misalkan dalam hal mengelolah produk umkm mereka dalam hal kemasan dan produk olahan makanannya misalkan dodol dulu dodol hanya ada beberapa rasa, kami berimaskan kepada pelaku umkm untuk menambah varian rasa seperti rasa nangka, rasa nanas, rasa pisang. Tujuan kami untuk memajukan pelaku usaha mikro kecil untuk berkembang dan bersaing dengan produk-produk yang lainnya”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi/pengamatan yang penulis lakukan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang berada dikabupaten siak yang berjumlah 20 orang reponden dengan hasil pengamatan penulis mengenai Penguatan kegiatan sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tanggapan responden tetapi rata-rata responden dalam menanggapi indikator tentang penguatan kegiatan sebagai berikut .:

“kami selaku umkm semangkin memahami dengan adanya pelatihan kewirausahaan dan manajemen perdaganganyang diberikan oleh Dinas Koperasai dan UMKM, guna membantu kami dalam mengelolah dan memasarkan produk kami, tidak hanya itu pelatihan tentang pemanfaatan internet, sosmed untuk memasarkan poduk umkm kami juga sangat mempermudah pemasaran produk kami, mengingat sebagian kami banyak yang tidak paham dalam penggunaan internet, lalu mengenai pelatihan bimbingan peningkatan mutu produk salah satunya mengenai kemasan,

label, pihak dinas koperasi umkm selalu memberi rekomendasi, arahan kepada kami mengenai kemasan apa yang bagus digunakan, label seperti apa yang menarik, sehingga produk-produk kami bisa bersaing dengan produk lainnya, akan tetapi semua pelatihan yang diberikan dinas koperasi dan umkm kepada kami hanya sebatas pelatihan banyak dari kami yang menjalankannya harus mengalami banyak kendala dari mulai menjajakan kemasayarakat, tersendat di permodalan, alat dll. dari pihak dinas sendiri sudah hampir 2 tahun terakhir tidak pernah lagi mendatangi kami pelaku umkm guna menanyakan apa kendala setelah melakukan pelatihan, 2 tahun ini hanya melakukan pelatihan-pelatihan saja”.

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan dilokasi penelitian serta data yang diberikan oleh responden dari indikator Penguatan masih cukup baik. Dikarenakan petugas dalam melakukan monitoring turun langsung melakukan pengecekan kesetiap pelaku umkm hanya berjumlah sedikit sehingga pihak dinas koperasi usaha mikro kecil dan menengah masih kekurangan personil untuk melakukan kegiatan itu, sehingga terdapat kendala dalam melakukan pengamatan terhadap pelaku umkm.

Dari uraian data tabel V.5a, data hasil wawancara/Kuisisioner serta hasil pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan penguatan (*empowering*) merupakan salah satu pola memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri, penguatan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan dan Manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM, memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (information, communication, technology) bagi UMKM dan memberikan bimbingan peningkatan mutu produk UMKM. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di

Kabupaten Siak sudah melakukan penguatan (*empowering*) yang telah diuraikan diatas, walaupun masih adanya kekurangan dalam melakukan indikator penguatan(*empowering*), akan tetapi indikator penguatan (*empowering*) menurut penulis berada pada kategori cukupbaik karena sudah berusaha memberikan kontribusi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Siak.

3. Perlindungan (*Protecting*)

Yaitu Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil..

Hasil tanggapan responden tentang indikator penguatan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil di Kabupaten Siak dapat dilihat ditabel dibawah sebagai berikut

Tabel V.6 : Distribusi Jawaban Responden(Pelaku Usaha Mirko Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Perlindungan (*protecting*).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Perlindungan sertifikat halal	6	4	10	20
2.	Perlindungan sertifikat hak merek	7	5	8	20

3.	Perlindungan sertifikat (SPP-IRT)	4	16	20
----	--------------------------------------	---	----	----

Sumber Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.6 diatas disimpulkan bahwa tanggapan responden untuk menjawab indikator perlindungan(*protecting*) yang terdiri dari tiga penilaian yang diberikan, jawaban responden yang menyatakan baik pada item penilaian yang pertama yaitu 6 orang responden, yang menyatakan cukup baik berjumlah 4 orang dan yang menyatakan kurang baik 10 orang responden.

Pada item yang kedua yaitu perlindungan sertifikat hak merek dengan jawaban responden yang menyatakan baik 7 orang, yang menyatakan cukup baik 5 orang dan yang menyatakan kurang baik 8 orang responden.

Pada item yang ketiga yaitu perlindungan sertifikat (SPP-IRT) dengan jawaban responden yang menyatakan cukup baik 4 orang dan yang menyatakan kurang baik 16 orang responden.

Tabel V.6a : Analisis Distribusi Jawaban Responden (Pelaku Usaha Mikro Kecil) Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Terhadap Indikator Perlindungan (*protecting*).

No	Item Yang Dinilai	Kategori Penelitian			Jumlah
		Baik	Cukup	Kurang	
		Skor (3)	Skor(2)	Skor(1)	
1.	Perlindungan sertifikat halal	18	8	10	36
2.	Perlindungan sertifikat hak merek	21	10	8	39
3.	Perlindungan sertifikat (SPP-IRT)		8	18	26
Total Skor					101

Sumber Data Olahan Hasil Penelitian 2019

Dari tabel V.6a diatas dan teknik penghitungan penelitian yang digunakan yaitu :

$$\text{Skor Tertinggi} : 22 \times 3 = 60$$

$$\text{Skort Indikator} : 60 \times 3 = 180$$

$$\% = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Indikator}} \times 100$$

$$= \frac{101}{180} \times 100 = 56.1\%$$

Berdasarkan hasil analisis distribusi jawaban responden mengenai perlindungan(*protecting*) pemberdayaan usaha mikro kecil dikabupaten siak sebanyak 56.1% sehingga dapat dikatakan cukup baik karena berada dikisaran 34-66%

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang UMKM Kabupaten Siak yaitu ibu Herzulidianti, SE.,MM, pada tanggal 12 Agustus 2019 mengenai indikator perlindungan :

“untuk indikator perlindungan (protecting) salah satunya sertifikat halal untuk sekarang ini sudah 84 pelaku umkm yang sudah kami bantu mendapatkan sertifikat halal, dan bantuan hak merek kemasan, kami selalu mengajak para pelaku umkm untuk membuat sertifikat halal, hak merek, spp-irt untuk meningkatkan mutu dari umkm itu sendiri agar masyarakat percaya akan produk-produk mereka. Untuk hak merek kami fasilitasi pengurusan hak merek ke kementerian Koperasi dan UMKM dan untuk sertifikat produk pangan (SPP-IRT) kami tidak pernah melakukan perlindungan atas sertifikat ini akan tetapi yang berwenang mengeluarkan sertifikat ini Dinas Kesehatan kami hanya mensosialisasikan pengurusan SPP-IRT untuk peningkatan kualitas Produk UMKM dan sejauh ini mengenai perlindungan kami sudah jalankan dengan baik”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu bapak Julio Karya, SE pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai indikator Perlindungan :

“mengenai indikator perlindungan setiap kami melakukan pelatihan kami selalu mensosialisasikan pentingnya sertifikat merek, sertifikat halal dan sertifikat SPP-IRT kepada pelaku umkm, Gunanya untuk menambah kepercayaan masyarakat atas produk yang mereka pasarkan dan sejauh ini sudah 84 pelaku umkm yang sudah kami bantu mendapatkan sertifikat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis kepada kepala seksi pengembangan sumber daya dan jaringan usaha yaitu ibu Dra. Hj. Herlina Khitra Dewi, M.Pd. pada tanggal 13 Agustus 2019 mengenai indikator Perlindungan:

“mengarah pada indikator perlindungan sejauh ini saya hanya mensosialisasikan saja karna saya sendiri selalu turun untuk melihat perkembangan pelaku ukm yang berada di kandis, dan di kecamatan lainnya akan tetapi jika ada yang ingin mengurus sertifikat merek, halal dan SPP-IRT ketika saya sedang turun, saya selalu berikan informasi tersebut kepada kapid UMKM, untuk ditindak lanjuti”.

Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi/pengamatan yang penulis lakukan terhadap pelaku usaha mikro kecil yang berada di kabupaten siak yang berjumlah 20 orang responden dengan hasil pengamatan penulis mengenai perlindungan kegiatan sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan tanggapan responden tetapi rata-rata responden dalam menanggapi indikator tentang perlindungan kegiatan sebagai berikut :

“kami akui memang ada sosialisasi mengenai sertifikat halal, hak merek dan SPP-IRT dan mereka pihak dinas memberikan pengurusan secara Cuma-Cuma akan tetapi yang diberikan pengurusan secara Cuma-Cuma oleh dinas koperasi dan UMKM kabupaten siak dalam pengurusan sertifikat halal tidak semua dari kami mendapatkan bantuan pengurusan itu. hanya ada beberapa pelaku umkm saja yang mendapatkannya, salah satunya karna faktor usahanya memang sudah maju akan tetapi penggunaan sertifikat halal, hak merek dan SPP-IRT tidak dimiliki, lalu adanya kedekatan dengan orang dinas koperasi dan UMKM dengan pelaku umkm. Selebihnya pelaku umkm mengurus sendiri, begitu juga dengan sertifikat hak merek akan tetapi sebagian kami masih terkendala dengan persyaratan yang diberikan dalam pengurusan sertifikat halal dan merek .Sertifikat (SPP-IRT) memang kami mengurusnya sendiri kedinas kesehatan.”

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilokasi penelitian serta data yang diberikan oleh responden dari indikator perlindungan, sesuai dengan peneliti jumpai dilapangan memang adanya sosialisasi perlindungan yang diberikan akan tetapi adanya keberpihakan dalam pengurusan sertifikat halal, merek dan spp-irt. hal ini terlihat saat saya melakukan penelitian hanya terdapat beberapa pelaku umkm yang memiliki sertifikat halal, hak merek dan SPP-IRT padahal sertifikat ini sebagai bukti layak atau tidaknya untuk dikonsumsi.

Dari uraian data tabel V.6a, data hasil wawancara/Kuisisioner serta hasil

pengamatan dilapangan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kegiatan perlindungan (*protecting*) merupakan salah satu cara melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil.

Perlindungan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Perlindungan sertifikat halal Perlindungan sertifikat hak merek Perlindungan sertifikat (SPP-IRT). Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Siak sudah melakukan perlindungan(*protecting*) yang telah diuraikan diatas, walaupun masih adanya kekurangan dalam melakukan indikator perlindungan (*protecting*), akan tetapi indikator perlindungan (*protecting*) menurut penulis berada pada kategori cukup baik karena sudah berusaha memberikan kontribusi dalam pemberdayaan usaha mikro kecil yang ada di Kabupaten Siak.

Selanjutnya untuk melihat hasil keseluruhan dari analisis pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel V.7 : Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017

No	Variabel	Idikator	Persentase
		Pemungkinan atau	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil	1 Fasilitasi (<i>enabling</i>)	64.4%
2		2 Penguatan (<i>Empowering</i>)	65.5%
3		3 Perlindungan (<i>protecting</i>)	56.1%
		Total	186 %
		Rata-rata	62 %

Sumber Data Olahan Penelitian 2019

Dari tabel V.7 diatas dijelaskan mengenai Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017 dapat disimpulkan masuk dalam kategori Cukup Baik sesuai dengan penjelasan dibab dua tentang Presentase 34-66% masuk pada kategori Cukup Baik artinya belum semua indikator terlaksana dengan baik.

Penilaian tentang analisis pemberdayaan usaha mikro kecil oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak, berdasarkan tiga prinsip yang dinilai telah dilaksanakan dengan cukup baik, terlihat dari data diatas setiap prinsip dalam Pemberdayaan usaha mikro kecil di Kabupaten Siak telah dilaksanakan dengan cukup baik. dijelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak telah melakukan pemungkinan atau fasilitasi, hanya saja sasaran yang dituju tidak semua masyarakat pelaku umkm melakukannya karna informasi yang penulis

dapatkan dilapangan hasil pendapatan penjualan pelaku ukm tidak cukup untuk membayar angsuran yang diberikan pihak Bank dan juga terkendala dengan syarat administrasi untuk pengajuan pinjaman. Dalam hal ini jawaban responden sesuai dengan hasil pengamatan penulis mengenai tingkat kesejahteraan jenis UKM di 2 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ini melalui pendapatan Per-Tahun masih kurang optimal.

Kemudian untuk penilaian pada indikator penguatan (*empowering*), sebagai mana yang telah penulis sebutkan diatas bahwa indikator ini berada pada kategori cukup baik, hal ini terlihat saat saya melakukan penelitian kepada pelaku umkm mereka mengeluhkan pelatihan yang diberikan dinas koperasi dan umkm kepada mereka hanya sebatas pelatihan, banyak dari mereka yang menjalankan nya harus mengalami banyak kendala dari mulai menjajakan produk, tersendat di permodalan, alat-alat produksi dll. dari pihak dinas sendiri sudah hampir dua tahun terakhir tidak pernah lagi mendatangi pelaku umkm guna menanyakan apa kendala setelah melakukan pelatihan. dalam hal ini jawaban responden sesuai dengan hasil pengamatan penulis mengenai terbatasnya jumlah pegawai sehinggadanya pelaksana yang merangkap 2 (dua) jabatan di 2 (dua) Seksi yaitu seksi UMKM dan seksi Pemasaran, Permodalan dan Kemitraan. Sehingga terkendala dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku pemula usaha mikro kecil.

Selanjutnya untuk penilaian pada indikator perlindungan (*protecting*), sebagai mana yang sudah penulis sebutkan diatas bahwa indikator ini berada pada kategori cukup baik, hal ini terlihat saat saya melakukan penelitian hanya

terdapat beberapa pelaku umkm yang memiliki sertifikat halal, hak merek dan SPP-IRT padahal sertifikat ini sebagai bukti layak atau tidaknya untuk dikonsumsi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab-bab yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka pada bab terakhir ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak Tahun 2016-2017. Selain kesimpulan, juga ada saran yang diharapkan nantinya akan bermanfaat sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan apabila akan melaksanakan program yang serupa sehingga bisa menjadi lebih baik, tepat sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan analisis serta pembahasan dan hasil dari penelitian ini. maka penulis memberikan kesimpulan. Ada beberapa yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut :

1. Pemungkinan atau Fasilitasi(*enabling*)

kegiatan pemungkinan atau fasilitasi merupakan salah satu pola pendukung atau pendampingan dalam upaya memberikan kemudahan dan akses bantuan, fasilitasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi umkm, memfasilitasi pengembangan sarana

promosi hasil produksi, memfasilitasi jaringan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Siak sudah melakukan pemungkinan atau faslitasi yang telah diuraikan diatas, Sebagaimana yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dikabupaten Siak akan tetapi pasti masih adanya kekurangan yang terlihat, akan tetapi indikator pemungkinan atau fasilitasi penulis dapat menyimpulkan sudah berada pada kategori cukup baik

2. Penguatan(*Empowering*)

bahwa kegiatan penguatan (*empowering*) merupakan salah satu pola memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri, pengutan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu memberikan pelatihan kewirausahaan dan Manajemen bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM, memberikan pelatihan pemanfaatan ICT (information, commuinction, technology) bagi UMKM dan memberikan bimbingan peningkatan mutu produk UMKM. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Siak sudah melakukan pengutan (*empowering*) yang telah diuraikan diatas, walaupun masih adanya kekurangan dalam

melakukan indikator penguatan (*empowering*) ini menurut penulis berada pada kategori cukup baik

3. Perlindungan(*protecting*)

kegiatan perlindungan (*protecting*) merupakan salah satu cara melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Perlindungan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Perlindungan sertifikat halal Perlindungan sertifikat hak merek Perlindungan sertifikat (SPP-IRT). Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil di Kabupaten Siak sudah melakukan perlindungan (*protecting*) yang telah diuraikan diatas, walaupun masih adanya kekurangan dalam melakukan indikator perlindungan (*protecting*), akan tetapi indikator perlindungan (*protecting*) menurut penulis berada pada kategori cukup baik

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan dalam penelitian mengenai Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak pada kegiatan pembinaan dan peningkatan SDM

yang berkompeten dibidangnya dilingkungan Dinas Koperasi dan UMKM, agar faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan berikutnya dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang telah ditetapkan pada saat perencanaan dapat tercapai dengan optimal, berikut ini adalah saran yang peneliti berikan kepada para aparat pemerintah selaku pelaksana program serta masyarakat pengelola usaha industri rumah tangga tersebut :

1. Disarankan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak untuk tetap meningkatkan SDM yang berkompeten dibidangnya dan juga terus meningkatkan Pemberdayaan Usaha Mikro kecil di Kabupaten Siak sehingga lebih berkembang dan maju.
2. Disarankan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam hal Pemungkinan atau Fasilitasi diharapkan agar lebih berperan aktif dalam melakukan kegiatan pendampingan dalam upaya memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro kecil dalam hal akses informasi maupun dalam hal administrasi. Yang nantinya pelaku usaha mikro kecil agar bisa berkembang dalam menjalankan usahanya.
3. Sebaiknya dalam hal penguatan (*Empowering*) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam melakukan setiap kegiatan pelatihan agar selalu adanya pengawasan atau pendampingan setelah melakukan pelatihan kepada pelaku usaha mikro kecil agar mereka benar-benar bisa menjalankan usahanya dengan mandiri.
4. Disarankan kepada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Siak dalam hal Perlindungan (*protecting*) diharapkan agar tidak ada lagi keberpihakan dalam memberikan

pelayanan pengurusan sertifikat halal, merek kepada pelaku usaha mikro kecil.

5. Diharapkan kepada masyarakat pengelola usaha mikro kecil di Kabupaten Siak agar mampu mengembangkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan produk lain dan terus berinovasi sehingga usaha yang dikelola dapat berkembang dan dapat mensejahterakan hidupnya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, Krisnha S. Andini, Prima G.P Nugraha, Totok Mardikanto, 2015. *Pembanguna Berbasis Masyarakat*. Alfabeta.
- Darwis, Erni Yulinda, dan Lamun Bathara, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pelatihan Universitas Riau.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Hasibuan, Melayu. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu. 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Ketujuh*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 2007. *Management*. Yogyakarta : BPFR-Yogyakarta.
- Ife Jim. 1995. *Community Development: Creating Community Alternative, Vision, Analysi and Prractice, Australia: Logman*.
- Kusdi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta : Selemba Humanika.
- Mangku Negara, A A Anwar Prabu. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung : Resdakarya.
- Manullang. M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada Univesitas Press.
- Mardikanto, T. 2010. *Konsep-Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Surakarta : UNS Press.
- Mustopadidjadjaja AR. 2003. *SANKRI buku 1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta. Gunung Agung.
- Pranaka, A.M.W dan Prijiono, Oni, 1996. *Penyunting Pemberdayaan Konsep dan Impementasi*, Jakarta : CSIS
- Rachmawati, Ike Kusdyah. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : CV Andi.
- Safri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jatinangor : Erlangga.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung. CV Mandar Maju.
- Siagian Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- _____ . 2006. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Siswanto, HB. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.

Subejo dan Supriyanto, 2005. *Kerangka Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Menuju Pembangunan Yang Berkelanjutan. Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian No.1 Juli (2005). 17-32.*

Edy Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung : PT. Refika Aditama.

Sugiono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung : Alfabeta.

Sufian Hamim. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen.* Pekanbaru. UIR Press.

Syafi'I Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANKRI).* Jakarta, Bumi Aksara.

Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen.* Jakarta : Bumi Aksara.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Pekanbaru. UIR Press.

Dokumentasi :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Bupati Siak Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Siak.